

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **SEKRETARIAT**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keberhasilan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi terhadap peningkatan

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

Peringatan:

kinerja akan terhambat

	Nomor SOP	1.2.17	
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal efektif	4 Januari 2021	
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU CIERCABURATEN SUMEDANG H. ACUS SCHERMAN S.Sos., M.Si NIP. 19690809 199101 1 001	
	Nama SOP	Prosedur penjatuhan sanksi kepada pegawai	
asar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :		
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan			
eterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :		
	ATK		
ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :		

Bagan Alur Prosedur Penjatuhan Sanksi Kepada Pegawai

	Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Atasan Langsung	Pegawai	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Atasan langsung mendapatkan laporan/data/melihat pelanggaran disiplin pegawai			Data/saksi/Melihat sendiri	15 menit	Pencatatan indisipliner		
2	Atasan langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan dan dibuat dalam berita acara pemanggilan			Surat pemanggilan	30 menit	Berita Acara pemanggilan		
3	Pegawai yang telah dilakukan pembinaan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan berita acara di tembuskan ke BKPSDM		_	Berita Acara Pemanggilan	30 menit			
4	Dokumentasi				10 menit			